



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**RENJA
RENCANA KERJA
TAHUN 2024**

DINAS KOPERASI & UKM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan ridhonya telah dapat diselesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas selama satu tahun kedepan.

Penyusunan RENJA-SKPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 ini dilandasi dengan mempelajari kondisi tahun lalu dan tren yang terjadi dimasa mendatang. Kebijakan-kebijakan baik yang berskala regional maupun nasional dijadikan acuan di dalam penyusunan, termasuk juga telah mengantisipasi adanya isu strategis dan gejala sosial sewaktu-waktu yang akan terjadi dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Demikian juga aspirasi masyarakat maupun dunia usaha merupakan masukan yang berguna dalam penyusunan dokumen ini.

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan, informasi, data, dan kontribusi terhadap tersusunnya RENJA-SKPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024.

Palembang, 16 Februari 2024

KEPALA DINAS,



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 196605091992031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	38
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah.....	40
3.3 Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	52
BAB V PENUTUP.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	5
Tabel II-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	12
Tabel II-3 Review terhadap Rancangan Awal RDKP Tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	27
Tabel II-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	34
Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi & UKM Tahun 2024.....	40
Tabel III-2 Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2024-2026. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RENJA perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RENSTRA perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja.

Pada rancangan awal rencana kerja telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2022 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2023. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan koperasi dan UKM, baik di Sumatera Selatan maupun nasional. Serta memperhatikan arah kebijakan urusan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 untuk pengalokasian pagu indikatif dan penentuan target lokasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2024, yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan;
- Bab II merupakan hasil evaluasi RENJA, baik yang telah dilaksanakan hingga tahun 2022 maupun proyeksi pencapaian tahun 2023 serta isu-isu penting penyelenggaraan perangkat daerah dan review terhadap rancangan awal RKPd;
- Bab III Tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 serta telaah terhadap kebijakan nasional;
- Bab IV berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif untuk tahun 2024;
- Bab V Penutup.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dan capaian atas Rencana Strategis tahun 2024-2026. Selain itu akan disajikan pula analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Review terhadap rancangan awal RKPD.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan untuk tahun 2024-2026. Adapun evaluasi RENJA tahun 2022 didasarkan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026.

Evaluasi hasil pelaksanaan RENJA tahun 2022 dan perkiraan pencapaian RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2023 disajikan melalui tabel II-1.

Tabel II-1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	98 %	100 %	98 %	98,00	100 %	98 %	98,00		
2	17	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	98 %	100 %	98 %	98,00	100 %	98 %	98,00	
2	17	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	3 dok	3 dok	100,00
2	17	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA- SKPD	1 dok	0 dok	0 dok	0 dok	-	1 dok	0 dok	-
2	17	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA- SKPD	1 dok	0 dok	0 dok	0 dok	-	1 dok	0 dok	-
2	17	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 lap	0 lap	0 lap	0 lap	-	6 lap	0 lap	-
2	17	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	12 lap	3 lap	25,00
2	17	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	97 %	100 %	97 %	97,00	100 %	98 %	97,67	
2	17	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100,00	14 bulan	14 bulan	100,00
2	17	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 bulan	13 bulan	13 bulan	13 bulan	100,00	13 bulan	13 bulan	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	17	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dok	0 dok	0 dok	0 dok	-	1 dok	0 dok	-
2	17	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	0 lap	0 lap	0 lap	-	1 lap	0 lap	-
2	17	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 lap	0 lap	0 lap	0 lap	-	4 lap	0 lap	-
2	17	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	96 %	100 %	97 %	97,00	100 %	98 %	97,67
2	17	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	0 dok	0 dok	0 dok	-	1 dok	0 dok	-
2	17	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya diklat kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	100 %	95 %	100 %	96 %	96,00	100 %	97 %	97,00
2	17	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan makan minum rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	17	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
2	17	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya aplikasi/software penunjang operasional perangkat daerah	2 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100,00	1 aplikasi	1 aplikasi	100,00
2	17	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	94 %	100 %	96 %	96,00	100 %	97 %	96,67
2	17	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya tagihan telepon, air dan listrik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor dan tutor SKJ	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	95 %	100 %	95 %	95,00	100 %	97 %	96,67
2	17	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara serta Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	17 unit	17 unit	17 unit	100,00	17 unit	17 unit	100,00
2	17	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Terfasilitasnya izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	100 %	0 %	0 %	0 %	-	100 %	0 %	-
2	17	2	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah	Terfasilitasnya izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	100 %	0 %	0 %	0 %	-	100 %	0 %	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
2	17	2	1.01	1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	20 unit usaha	0 unit usaha	0 unit usaha	0 unit usaha	-	20 unit usaha	0 unit usaha	-
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	20 koperasi	8 koperasi	20 koperasi	8 koperasi	40,00	20 koperasi	8 koperasi	40,00
2	17	3	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti peningkatan kompetensi perkoperasian	100 orang	0 orang	100 orang	100 orang	100,00	100 orang	100 orang	100,00
2	17	3	1.01	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	0 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	100,00	20 unit usaha	20 unit usaha	100,00
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	20 koperasi	8 koperasi	20 koperasi	8 koperasi	40,00	20 koperasi	8 koperasi	40,00
2	17	4	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi Binaan provinsi yang mengikuti pelatihan KSP dan USP koperasi	100 %	0 %	0 %	0 %	-	100 %	0 %	-
2	17	4	1.01	1	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jati diri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jati diri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	20 unit usaha	0 unit usaha	0 unit usaha	0 unit usaha	-	20 unit usaha	0 unit usaha	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023																																		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																																	
1				2				3				4				5				6				7				8=(7/6)				9				10=(5+7+9)				11=(10/4)			
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah UMKM naik kelas	2500 UMK	675 UMK	500 UMK	713 UMK	142,60	2500 UMK	220 UMK	8,80																													
						Persentase pertumbuhan modal koperasi	8,5 persen	5 persen	2 persen	195,7 persen	9785,00	8,5 persen	4,9 persen	57,65																													
2	17	5	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikat pelatihan	350 orang	845 orang	350 orang	395 orang	112,86	350 orang	1590 orang	454,29																													
2	17	5	1.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	350 orang	845 orang	350 orang	395 orang	112,86	350 orang	1590 orang	454,29																													
2	17	5	1.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM UKM yang mendapatkan sertifikat pelatihan	350 orang	845 orang	350 orang	395 orang	112,86	350 orang	1590 orang	454,29																													
2	17	5	1.02	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Meningkatkan kapasitas serta kompetensi SDM UKM	350 orang	845 orang	350 orang	395 orang	112,86	350 orang	1590 orang	454,29																													
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	3 persen	0 persen	0 persen	0 persen	-	3 persen	1 persen	33,33																													
2	17	6	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi aktif	20 koperasi	130 koperasi	100 koperasi	101 koperasi	101,00	20 koperasi	20 koperasi	100,00																													
2	17	6	1.01	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 unit usaha	0 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	100,00	20 unit usaha	20 unit usaha	100,00																													

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah kenaikan wirausaha baru	350 UKM	0 UKM	350 UKM	210 UKM	60,00	350 UKM	350 UKM	100,00
2	17	7	1.01		<i>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha</i>	<i>1 persen</i>	<i>1 persen</i>	<i>1 persen</i>	<i>1 persen</i>	<i>100,00</i>	<i>1 persen</i>	<i>1 persen</i>	<i>100,00</i>
2	17	7	1.01	1	Menumbuhkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	700 unit usaha	0 unit usaha	350 unit usaha	320 unit usaha	91,43	700 unit usaha	670 persen	95,71
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase kenaikan omzet UMKM	30 persen	11 persen	10 persen	11 persen	110,00	30 persen	32 persen	106,67
2	17	8	1.01		<i>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</i>	<i>Jumlah UMKM yang dibina</i>	<i>100 persen</i>	<i>80 persen</i>	<i>100 persen</i>	<i>80 persen</i>	<i>80,00</i>	<i>100 persen</i>	<i>80 persen</i>	<i>80,00</i>
2	17	8	1.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30 unit usaha	0 unit usaha	30 unit usaha	30 unit usaha	100,00	30 unit usaha	30 unit usaha	100,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun serta proyeksi capaian indikator kinerja utama pada tahun 2023 dan 2024 yang berdasar pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024.

Jumlah Koperasi Sehat

Koperasi sehat merupakan koperasi yang memenuhi kriteria dalam pemeriksaan kesehatan koperasi dengan output sehat dan cukup sehat. Tahun 2021 merupakan tahun reformasi pengawasan koperasi melalui diundangkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, dimana telah dilakukan penyempurnaan kertas kerja pengawasan koperasi dari sebelumnya pemeriksaan dilakukan secara parsial menjadi komprehensif.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Objek pengawasan Koperasi terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.

Objek pengawasan Koperasi dibagi dalam 4 (empat) tingkat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK). Penentuan tingkat KUK berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai Koperasi yang bersangkutan. KUK I dengan anggota < 5.000 orang , modal sendiri < 250 juta dan aset < 2,5 Miliar. KUK II dengan anggota 5.001 – 9.000 orang, modal sendiri > 250 juta s.d 15 Miliar dan aset > 2,5 Miliar – 100 Miliar. KUK III dengan anggota 9.001 – 35.000 orang, modal sendiri > 15 Miliar - 40 Miliar dan aset > 100 Miliar - 500 Miliar sedangkan

Tabel II-2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Rasio Kewirausahaan	-	-	3 %	3 %	3 %	-	-	300 UMK	500 UMK	
2	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	-	-	3 %	4 %	4 %	1 %	1 %	1 %	1 %	
3	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	-	-	5 %	5 %	5 %	1 %	1 %	1 %	1 %	
4	Prosentase Pertumbuhan Modal Koperasi	-	-	12 %	13 %	15 %	4,9 %	5 %	8 %	12 %	
5	Persentase Koperasi Aktif	-	-	20 Unit	20 Unit	20 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	

KUK IV dengan anggota > 35.000 orang, modal sendiri > 40 Miliar, dan aset > 500 Miliar.

Dalam kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi berpedoman pada Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan. KKPKK terdiri dari aspek tata kelola (paling sedikit meliputi prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen termasuk uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas koperasi terutama bagi KUK 3 dan KUK 4), profil risiko (penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko), kinerja keuangan (evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan), dan permodalan (kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan).

Selanjutnya, terhadap hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam dokumen LHPKK (Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi) yang berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi yaitu:

- sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x \leq 100$
- cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80,00$;
- dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$; dan
- dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Sepanjang tahun 2022 dan 2023, realisasi jumlah koperasi sehat adalah 20 unit usaha atau 100% dari target 20 koperasi binaan provinsi yang ditetapkan. Adapun kendala dalam pencapaian indikator ini adalah masih sedikitnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) selama dua tahun berturut-turut yang mana hal tersebut adalah persyaratan awal bagi Pengawas Koperasi untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan Kesehatan. Untuk mengatasi kendala tersebut, melalui PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) yang berjumlah 62 orang dilakukan pendampingan kepada koperasi aktif agar dapat melaksanakan RAT setiap tahunnya. Selain itu, melalui Tim Satgas Pengawas Koperasi yang berjumlah 72 orang di Provinsi dan 17 Kab/Kota dilakukan pengawasan Koperasi secara periodik melalui pemeriksaan kesehatan koperasi dengan menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.

Adapun kegiatan di Tahun 2024 yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target indikator koperasi sehat ini adalah:

- Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (output: 54 orang pembina koperasi dibimtek)
- Peningkatan Kepatuhan dan Sanksi Koperasi (output: 54 orang pengurus koperasi dibimtek)
- Monev Pengawasan Koperasi (output: 20 koperasi diawasi)

Jumlah UMKM Naik Kelas

UMKM naik kelas adalah UMKM yang telah melengkapi dokumen legalitas, laporan keuangan, memiliki manajemen pemasaran serta perkembangan pangsa pasar dari tradisional ke modern (e-commerce) /ekspor.

Adapun tingkat capaian di tahun 2022 adalah 115% dengan realisasi 575 UMK dari 500 UMK yang ditargetkan tersebut didorong atas hasil dari kegiatan sebagai berikut:

- Pelatihan Manajer Koperasi Berbasis Kompetensi SKKNI di Provinsi
- Pelatihan Administrasi Keuangan bagi Penerima Bantuan Wirausaha Pemula Kab/Kota di Provinsi
- Administrasi Keuangan UKM di Lahat
- Legalitas UKM di Provinsi
- Pelatihan Teknis Pemanfaatan Bahan Alam dalam Mendukung Pengembangan UMKM di Ogan Ilir
- Pelatihan Keterampilan Teknis Membuat Motif Tenun Songket (Cukitan) di Banyuasin
- Pelatihan Kemasan di Muratara, OKI
- Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM di Empat Lawang, OKU Selatan, Provinsi

Sementara tingkat capaian di tahun 2022 (sampai dengan triwulan III) masih di angka 44% dengan realisasi 220 UMK dari 500 UMK yang ditargetkan dengan dukungan kegiatan sebagai berikut:

- Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan Bagi UMKM di Kab. Muratara
- Pembukuan Sederhana Bagi UMKM di kab. Empat Lawang
- Pelatihan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) dan Kemasan Pangan di Kab. OI
- Pelatihan Teknis Desain Kemasan dan Pembuatan Logo Produk UMKM di Kab. OKUS

- Pelatihan Pembuatan Aneka Kerajinan dari Lidi Sawit di Kab. Musi Rawas
- Pelatihan Keterampilan Teknis (pengolahan jagung) di OKU Raya
- Pelatihan Digital Marketing UMKM dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan UMKM di Kab. OKI
- Pelatihan E-Commerce Bagi Pelaku Mikro Usaha di Kab. OKU

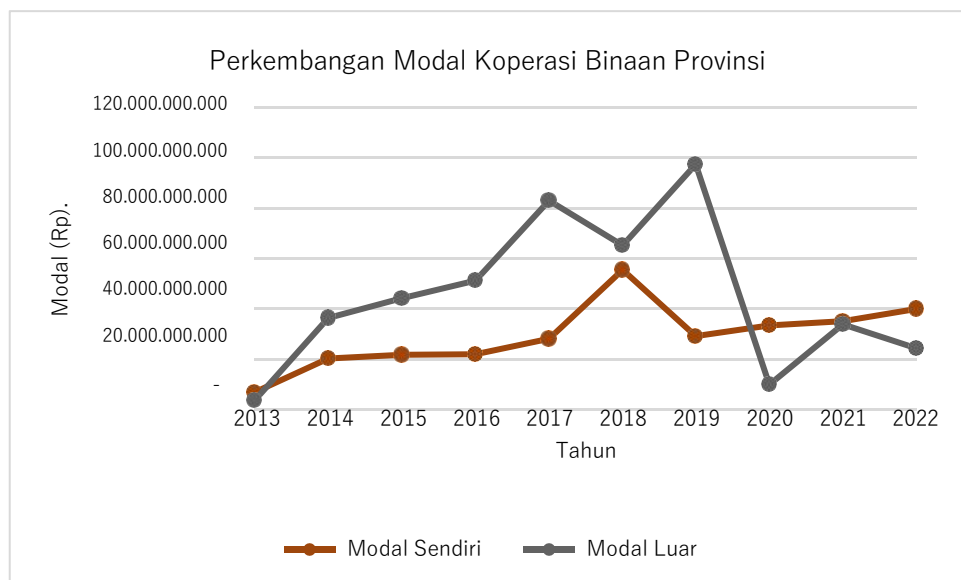
Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi

Modal koperasi merupakan 'katalis' yang menggerakkan kelancaran penyelenggaraan usaha Koperasi yang mana bentuk pengorganisasian usaha tersebut didasari atas mandat melayani kebutuhan anggota dan juga peluang bisnis kepada non anggota. Sehingga pertumbuhan modal koperasi akan mendorong koperasi untuk dapat bergerak lebih leluasa dalam melayani anggota dan potensi bisnis kepada masyarakat luas.

Modal koperasi berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri dan modal luar (modal asing). Koperasi dapat memanfaatkan modal sendiri dan modal asing dalam upaya memenuhi kebutuhan modalnya. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung risiko. Adapun modal sendiri meliputi:

1. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota. Nilai atau besaran simpanan pokok diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan.
2. Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.+
3. Dana Cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutupi kerugian koperasi yang mungkin terjadi atau bila diperlukan. Dana cadangan juga dimaksudkan bagi jaminan koperasi di masa yang akan datang dan diperuntukkan bagi perluasan usaha, pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota
4. Hibah merupakan sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upaya ikut serta mengembangkan usaha koperasi

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara ada di dalam perusahaan koperasi, dan bagi perusahaan koperasi modal tersebut merupakan utang, yang pada saatnya harus dibayar kembali atau biasanya didapatkan dari proses pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Modal ini dapat dikelompokkan menjadi utang jangka pendek (jangka waktunya paling lama 1 tahun), utang jangka menengah (jangka waktunya paling lama 10 tahun) dan utang jangka panjang (jangka waktunya lebih dari 10 tahun). Modal asing atau modal pinjaman ini dapat berasal dari pinjaman anggota yang memenuhi syarat, koperasi lain yang didasari atas perjanjian kerja sama, bank dan lembaga keuangan, penerbitan obligasi dan surat utang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau sumber lain yang sah berupa pinjaman dari bukan anggota.



Adapun tingkat pertumbuhan modal koperasi di tahun 2021 adalah 37% atau senilai Rp68.884.196.007 dibandingkan jumlah modal tahun 2020 senilai Rp43.286.531.072. Sehingga tingkat capaian indikator ini adalah 1.850% dari target 2% yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan permodalan koperasi, selain kegiatan sosialisasi dan bimtek pembiayaan usaha melalui LPDB-KUMKM, juga dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pelatihan Manajerial bagi Pengurus Koperasi Baru di Ogan Ilir
- Pelatihan Manajemen Kepengurusan Koperasi di OKU Selatan

- Pelatihan Manajer Koperasi Berbasis Kompetensi SKKNI di Provinsi
- Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi bagi Pengurus Koperasi di Empat Lawang, Muratara, Lahat, OKI
- Pelatihan Manajemen dan Organisasi bagi Pengurus Koperasi di Banyuasin
- Pelatihan Manajemen Kepengawasan Koperasi di Provinsi

Namun kemudian terjadi koreksi tingkat pertumbuhan modal koperasi di tahun 2022 (November) sebesar -7% atau senilai Rp64.215.680.447 dibandingkan jumlah modal tahun 2021 senilai Rp68.884.196.007. Sehingga tingkat capaian indikator ini adalah -350% dari target 2% yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan permodalan koperasi, dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimtek pembiayaan usaha melalui LPDB-KUMKM juga dirintis pembiayaan kredit UMi (Ultra Mikro) melalui koperasi sebagai penyalur. Selain itu, melalui Dana DAK Non Fisik dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi di Kab. OKU
- Pelatihan Sistem Pengendalian Internal Koperasi di Kab. Muratara
- Pelatihan Administrasi Perkoperasian (Teknis Pengisian Buku Koperasi) di kab. Empat Lawang
- Pelatihan Tentang Koperasi Syariah di Kab. OI
- Pelatihan Laporan Perpajakan Bagi Koperasi di Kab. OKUS
- Pelatihan Manajemen Koperasi di Kab. Musirawas
- Pelatihan Koperasi dalam Peningkatan Literasi Teknisi Informasi dan Sistem Akuntansi pelaporan Keuangan Otomatis di Kab. OKI
- Pelatihan Teknologi Informasi (pelatihan koperasi dlm peningkatan teknologi dan sistem akuntansi pelaporan keuangan otomatis) di Provinsi
- Kompetensi Manajer di Provinsi
- Kompetensi Juru Buku di Provinsi
- Kompetensi Kasir di Provinsi

Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Koperasi yang dinyatakan sebagai koperasi berkualitas adalah koperasi yang melaksanakan RAT serta volume usaha dan asetnya meningkat (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Pada tahun 2021, capaian indikator koperasi berkualitas adalah 100%. Dan di tahun 2022, melalui dukungan Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan 2 koperasi modern sebagai koperasi berkualitas di Sumatera Selatan yaitu:

1. Koperasi Produsen Mina Mitra Mandiri di Kabupaten OKU Timur, mendapat pendampingan di Bidang Teknologi Hasil Perikanan, dan
2. Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Rejeki Kabupaten Musi Rawas, mendapat pendampingan di Bidang Manajemen Produksi Pertanian

Adapun dukungan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Modern Berbasis Pertanian (output: Peserta sebanyak 30 orang dari Pengurus, Pengelola dan Anggota Koperasi di sektor pertanian)
- Advokasi Digitalisasi Koperasi (output: 40 org pembina koperasi, 36 koperasi)
- FGD Isu-Isu Strategis Perkoperasian (output: Peserta sebanyak 50 orang, terdiri dari Aparatur Pembina Koperasi dan UKM, dan Tenaga Pendamping Koperasi Modern)

Jumlah Wirausaha Baru

Kewirausahaan adalah proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu produk baru, cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, serta cara memasarkan produk tersebut. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman berbisnis. Seorang wirausahawan adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi.

Kewirausahaan perlu dikembangkan dalam rangka menyalurkan terbatasnya lapangan kerja serta menurunkan angka kemiskinan.

Untuk menaikkan jumlah wirausaha baru di Sumatera Selatan telah dilakukan berbagai upaya di antaranya dengan meningkatkan keinginan masyarakat untuk berwirausaha. Hal ini perlu dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki minat untuk berwirausaha. Selain

itu, juga perlu diberikan pendampingan yang tepat melalui pemberian bantuan alat-alat produk untuk memulai kegiatan usaha.

Adapun capaian indikator Jumlah Wirausaha Baru pada tahun 2021 adalah 91% dengan realisasi 320 orang dari target 350 orang. Dukungan kegiatan yang diberikan berupa pelatihan kewirausahaan dan bantuan mesin jahit kepada masyarakat miskin.

Sementara di tahun 2022 (sampai dengan November) jumlah wirausaha baru adalah 290 orang dari target 350 orang atau tingkat capaiannya 83% dengan dukungan kegiatan berupa bimtek menjahit kepada 210 orang penduduk miskin dan pelatihan kewirausahaan (3 angkatan) kepada total 90 orang.

Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha

Peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah rasio jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha dibandingkan dengan jumlah usaha kecil keseluruhan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Usaha kecil yang menjadi wirausaha artinya pelaku usaha perorangan berhasil meningkatkan skala usahanya sehingga mampu mempekerjakan orang lain dengan skema pembayaran upah yang sesuai ketentuan.

Tingkat capaian indikator usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah 100% dengan realisasi sesuai target yaitu 1% baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022. Dan dukungan kegiatan yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- Pelatihan Vocational berbasis e-Commerce (output: 16 orang)
- Pelatihan Vocational Bidang Fashion (output: 35 orang)
- Pelatihan Pengembangan Keahlian Internet of Thing (IOT) bagi UMKM (output: 40 orang peserta)
- Bimtek Fasilitasi Kegiatan Literasi Digitalisasi Keuangan (output: 30 peserta)
- Bimtek Fasilitasi Kegiatan Wirausaha Mentor dan Pendampingan terhadap Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif (output: 30 orang peserta)
- Pelatihan bagi Usaha Mikro berbasis Kompetensi di Bidang Ekspor (output: 30 orang peserta)

Persentase kenaikan omzet UMKM

Dalam menjalankan aktivitas usaha, baik skala kecil maupun besar, pelaku usaha tidak hanya berpatokan pada margin keuntungan yang besar, sebab hal tersebut tidak menjamin keberlanjutan suatu usaha. Patokan margin keuntungan besar justru bisa membuat omzet penjualan menjadi kecil. Sehingga, usaha tidak berlangsung lama karena penjualan tidak maksimal dan perputaran modal tidak lancar. Maka pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perlu didorong untuk meningkatkan omzet penjualan usahanya.

Adapun tingkat capaian indikator kenaikan omzet UMKM adalah 110% dari target peningkatan 10% yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2021 dan tahun 2022.

Dari aspek pemasaran, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya perluasan akses pasar bagi produk KUKM Sumatera Selatan, baik melalui online maupun offline dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

- Pameran SUMSEL EXPO
Output:
 - MoU Gubernur JABAR dan SUMSEL
 - PKS Pemprov JABAR dan SUMSEL
 - Partisipasi HARNAS UMKM dengan Kemenkop
- Partisipasi Pameran di SUMSEL
Output:
 - Pameran Sriwijaya Expo 2022
 - Pameran Gebyar UMKM Produk Unggulan Daerah
 - Expo Pempek di Sarinah
- Marketplace SumselMall (kerja sama GRAB)
Output: Aplikasi SUMSEL MALL di PlayStore dan App Store
- Marketplace IBS (Integrated Business Start-Up) kerja sama Palcomtech
- Fasilitasi UMKM masuk dalam Bela Pengadaan (katalog lokal) dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Fasilitasi Sertifikasi Halal (self declare) kerja sama dengan UIN Palembang
- Fasilitasi CPCL Sertikat Hak Atas Tanah UMKM untuk jaminan kredit perbankan
- Ekspose Produk Unggulan KUKM Daerah di Paviliun SMESCO (capaian omzet senilai Rp54.967.000 di tahun 2022 dengan Produk yang paling laku adalah Fashion - Kain Jumputan)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Laporan Bank Indonesia Bulan Agustus 2022 menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta berbagai indikator dini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan meningkat dengan inflasi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Perbaikan aktivitas perekonomian global dan nasional mendorong peningkatan kinerja perekonomian Sumatera Selatan baik dari sisi permintaan maupun lapangan usaha. Percepatan dan perluasan program vaksinasi juga menumbuhkan optimisme para pelaku usaha dan mendorong kinerja di beberapa sektor. Selanjutnya, perkembangan inflasi di tahun 2022 juga diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, namun tetap berada di dalam kisaran target inflasi nasional. Perbaikan perekonomian yang didukung oleh percepatan program vaksinasi akan meningkatkan daya beli masyarakat seiring dengan peningkatan pendapatan sebagai dampak peningkatan aktivitas ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada tahun 2022 diperkirakan meningkat, didorong oleh inflasi pada seluruh kelompok yakni volatile food, administered price, dan core inflation.

Agar pengembangan dan pembinaan sektor Koperasi dan UKM menjadi lebih efektif dan efisien serta mencapai target yang telah ditentukan diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pembinaan. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan terhadap pembangunan Koperasi dan UKM perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan yang mengakibatkan tidak tercapainya target serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian regional setelah adanya Pandemi Covid-19 secara makro telah mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi sebagai dampak aktivitas ekonomi yang tidak stabil. Naiknya harga bahan baku UKM dan sulitnya distribusi berdampak pada penurunan produksi. Selain itu minat pasar yang turun juga membuat sebagian besar UMKM di Sumatera Selatan memutuskan menghentikan aktivitas produksi. Banyak UMKM yang harus berhenti usaha atau beralih usaha, menyesuaikan keadaan. Sementara pasar yang dilakukan secara konvensional semakin mendapat batasan-batasan sebagai akibat social distancing. Artinya, pasar UMKM yang selama ini ditunjang oleh kehidupan pendidikan, pariwisata, dan event budaya; menjadi sangat terbatas

aksesnya. Akibatnya terjadi penurunan pendapatan pada sebagian besar UMKM di wilayah Sumatera Selatan.

Disisi lain usaha Koperasi juga terdampak secara langsung baik pada koperasi sektor riil maupun simpan pinjam. Koperasi sektor riil mengalami penurunan omset karena penjualan yang menurun dan kesulitan memasarkan jasa akibat penurunan kapasitas ekonomi masyarakat. Sedangkan koperasi simpan pinjam mengalami penurunan rasio likuiditas yang disebabkan oleh banyaknya anggota koperasi yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran.

Untuk merespons kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi, diperlukan langkah-langkah khusus terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan dan penganggaran. Pelaksanaan program / kegiatan perlu dilakukan identifikasi, sehingga dapat diketahui kegiatan prioritas dan kegiatan yang perlu dilakukan redesain maupun ditunda pelaksanaannya.

Identifikasi terhadap permasalahan yang mempengaruhi tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan telah dirumuskan sebagai berikut:

Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi

Rendahnya jumlah koperasi berkualitas di Sumatera Selatan diawali dengan sedikitnya koperasi yang menerapkan tata Kelola usahanya dengan baik, hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT setiap tahunnya. Permasalahan besar koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
 - b. Kaum muda (millenials) sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi yang berdampak pada tata kelola koperasi yang sulit mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan.
2. Kelembagaan
 - a. Secara statistik serapan tenaga kerja di sektor koperasi masih belum optimal sebab masih didominasi koperasi simpan pinjam (credit union);

- b. Koperasi akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait;
 - c. Koperasi masih dianggap sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum dipandang sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Pembiayaan.
Perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
4. Produksi dan Pemasaran
Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM

Kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 61,07% lebih dianggap tidak sebanding dengan jumlahnya yang lebih dari 90% pelaku usaha. Selain itu total nilai ekspor UMKM juga masih rendah yaitu hanya mencapai 14,37%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
 - a. Menurut data BPS tahun 2019, Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan hanya 22,48%.
 - b. Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi.
 - c. Tidak memiliki mentor bisnis menyebabkan UMK kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.
2. Produksi dan Pemasaran
 - a. Jumlah produk UMKM ekspor masih sangat sedikit disebabkan oleh kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah.
 - b. Kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa).

- c. Masih banyak yang belum memaksimalkan pemasaran secara online.
 - d. Masih banyak yang belum sadar akan pentingnya branding bagi produk dan usahanya.
3. Pembiayaan
- Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak. Di sisi lain, jasa pinjaman modal melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Kelembagaan
- Jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat dominan yakni mencapai 98,68%.

Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Kewirausahaan

Peringkat wirausaha di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, berdasarkan Global Entrepreneurship Index 2019 (GEI) Indonesia masih menempati peringkat ke-75 dari 137 negara. Indeks Entrepreneurship Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia peringkat 43, Brunei Darussalam peringkat 53, Thailand peringkat 54, dan Vietnam 73. Selain itu, rasio kewirausahaan Indonesia tahun 2020 baru sekitar 3,47%, angka ini cukup rendah bila dibandingkan dengan sesama negara ASEAN seperti Singapura yang mencapai 8,76 persen, Thailand sebesar 4,26 persen serta Malaysia yakni 4,74 persen.

Beberapa permasalahan kewirausahaan di Indonesia dimana bahwa sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan dinilai masih rendah seiring dengan rendahnya literasi kewirausahaan sejak usia dini. Selain itu, ekosistem untuk mendorong berkembangnya kewirausahaan belum menjadi sub sistem yang terbangun di tengah masyarakat khususnya pelaku usaha. Beberapa pihak banyak yang melakukan pelatihan, pendampingan dan dukungan ekspor namun dilakukan secara sporadis, belum adanya keterhubungan dan sinergi kewirausahaan melalui inkubator, pendekatan ekosistem yang utuh.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausaha baru, peningkatan skala usaha, peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Penduduk muda Indonesia tersebut berpotensi

menjadi wirausaha dan tenaga kerja yang memiliki talenta kreatif dan mampu menggerakkan dinamika ekonomi, sosial budaya di perkotaan maupun perdesaan.

Permasalahan dan Tantangan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMM juga memiliki beberapa permasalahan dan tantangan pada struktur organisasi saat ini, yaitu:

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Koperasi dan UKM kurang optimal untuk mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta belum selaras dengan struktur organisasi yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga sasaran pembangunan yang terkait dengan Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan akan sulit tercapai,
2. Indikator Kinerja di setiap bidang kurang memenuhi kaidah Indikator Kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely (SMART) sehingga berdampak pada aktivitas kegiatan pada masing-masing bidang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan OPD,
3. Terbatasnya jumlah SDM di OPD yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM. Dan dari jumlah SDM yang adapun, kapasitas aparatur yang menguasai substansi Koperasi, UMKM dan Pengembangan Kewirausahaan masih sangat rendah.

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Dinas, hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kelengkapan perizinan dan kelembagaan koperasi,
2. Peningkatan akses pembiayaan & kemitraan koperasi,
3. Peningkatan upaya pembaharuan koperasi,
4. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi,
5. Peningkatan pertumbuhan wirausaha produktif,
6. Peningkatan usaha yang bertransformasi dari informal ke formal,
7. Terwujudnya pemberdayaan UMKM yang efektif, dan
8. Peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan UMKM

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel II-3
Review terhadap Rancangan Awal RDKP Tahun 2024
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	16.046.998	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	16.046.998	
2	17	1	1.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			<i>Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	100 %	550.100	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	100 %	550.100	
2	17	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan/Luar Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	330.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan/Luar Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	330.100		
2	17	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	OPD	Dokumen RKA- SKPD	1 dok	50.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	OPD	Dokumen RKA- SKPD	1 dok	50.000		
2	17	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	OPD	Dokumen DPA- SKPD	1 dok	50.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	OPD	Dokumen DPA- SKPD	1 dok	50.000		
2	17	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan/Luar Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 lap	100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dalam dan/Luar Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 lap	100.000		
2	17	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 lap	20.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 lap	20.000		
2	17	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	100 %	11.165.057	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	100 %	11.165.057		
2	17	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	9.844.357	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	9.844.357		
2	17	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OPD	Terselenggaranya administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 bulan	946.660	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OPD	Terselenggaranya administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 bulan	946.660		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
2	17	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	OPD	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	224.040	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	OPD	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	224.040	
2	17	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	OPD	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dok	50.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	OPD	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dok	50.000	
2	17	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	50.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	50.000	
2	17	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	OPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 lap	50.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	OPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 lap	50.000	
2	17	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	130.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	130.000	
2	17	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	30.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	30.000	
2	17	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OPD	Terpenuhinya diklat kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi	12 bulan	100.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OPD	Terpenuhinya diklat kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi	12 bulan	100.000	
2	17	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.153.581	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.153.581	
2	17	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	50.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	50.000	
2	17	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	1.043.581	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	1.043.581	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
2	17	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Tersedianya alat tulis kantor dan makan minum rapat	12 bulan	300.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Tersedianya alat tulis kantor dan makan minum rapat	12 bulan	300.000	
2	17	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	OPD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	40.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	OPD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	40.000	
2	17	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	OPD	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	20.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	OPD	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	20.000	
2	17	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan/Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	700.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan/Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	700.000	
2	17	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah	100 %	90.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah	100 %	90.000	
2	17	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	OPD	Tersedianya aplikasi/software penunjang operasional perangkat daerah	2 aplikasi	90.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	OPD	Tersedianya aplikasi/software penunjang operasional perangkat daerah	2 aplikasi	90.000	
2	17	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	457.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	457.600	
2	17	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 bulan	20.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 bulan	20.000	
2	17	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Terpenuhinya tagihan telepon, air dan listrik kantor	12 bulan	250.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Terpenuhinya tagihan telepon, air dan listrik kantor	12 bulan	250.000	
2	17	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor dan tutor SKJ	12 bulan	187.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor dan tutor SKJ	12 bulan	187.600	
2	17	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya BMD sebagai penunjang	100 %	1.500.660	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya BMD sebagai penunjang	100 %	1.500.660	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
			urusan pemerintah daerah					urusan pemerintah daerah							
2	17	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OPD	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara serta Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	300.660	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OPD	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara serta Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	300.660	
2	17	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	OPD	Terpeliharanya Mebel kantor	12 bulan	100.000	Pemeliharaan Mebel	OPD	Terpeliharanya Mebel kantor	12 bulan	100.000	
2	17	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	100.000	
2	17	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	1.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	1.000.000	
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Terfasilitasinya izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	100 %	100.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Terfasilitasinya izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	100 %	100.000	
2	17	2	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Terfasilitasinya izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	100 %	100.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Terfasilitasinya izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	100 %	100.000	
2	17	2	1.01	1	Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	20 unit usaha	100.000	Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	20 unit usaha	100.000	
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Jumlah koperasi sehat	20 koperasi	400.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Jumlah koperasi sehat	20 koperasi	400.000	
2	17	3	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah		Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti peningkatan	100 orang	400.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah		Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti peningkatan	100 orang	400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
						Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		kompetensi perkoperasian							
2	17	3	1.01	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	400.000	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	400.000	
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Jumlah koperasi sehat	20 koperasi	400.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Jumlah koperasi sehat	20 koperasi	400.000	
2	17	4	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Koperasi Binaan provinsi yang mengikuti pelatihan KSP dan USP koperasi	100 %	400.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Koperasi Binaan provinsi yang mengikuti pelatihan KSP dan USP koperasi	100 %	400.000	
2	17	4	1.01	1	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	20 unit usaha	400.000	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	20 unit usaha	400.000	
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Jumlah UMKM naik kelas	2500 UMK	900.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Jumlah UMKM naik kelas	2500 UMK	900.000	
2	17	5	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah		Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikat pelatihan	350 orang	500.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah		Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikat pelatihan	350 orang	500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
2	17	5	1.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah SDM koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	350 orang	500.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah SDM koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	350 orang	500.000	
2	17	5	1.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah SDM UKM yang mendapatkan sertifikat pelatihan	350 orang	400.000	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah SDM UKM yang mendapatkan sertifikat pelatihan	350 orang	400.000	
2	17	5	1.02	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Meningkatnya kapasitas serta kompetensi SDM UKM	350 orang	400.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Meningkatnya kapasitas serta kompetensi SDM UKM	350 orang	400.000	
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	3 persen	1.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	3 persen	1.500.000	
2	17	6	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah koperasi aktif	20 koperasi	1.500.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah koperasi aktif	20 koperasi	1.500.000	
2	17	6	1.01	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 unit usaha	1.500.000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 unit usaha	1.500.000	
2	17	7			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Jumlah kenaikan wirausaha baru	350 UKM	600.000	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA		Jumlah kenaikan wirausaha baru	350 UKM	600.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
						KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)											
2	17	7	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	1 persen	600.000	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	1 persen	600.000	
2	17	7	1.01	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	700 unit usaha	600.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	700 unit usaha	600.000			
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Prosentase kenaikan omzet UMKM	30 persen	1.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Prosentase kenaikan omzet UMKM	30 persen	1.500.000			
2	17	8	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Jumlah UMKM yang dibina	100 persen	1.500.000	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Jumlah UMKM yang dibina	100 persen	1.500.000			
2	17	8	1.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30 unit usaha	1.500.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dalam dan/Luar Daerah	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30 unit usaha	1.500.000			
TOTAL									21.446.998							21.446.998	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut ini diuraikan program/kegiatan dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Rapat Teknis Perencanaan.

Tabel II-4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota				
1	Revitalisasi Pasar	Koperasi Sehati Bandar Jaya, Koperasi Anugerah dan Koperasi Selangis Indah Kab. Lahat	Jumlah pasar yang dibangun berupa los, kios dan lapak pasar yang dibangun melalui koperasi	3 pasar	DAK FISIK
	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				
2	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Talang Ubi, Desa Talang Akar PALI	Pengembangan Usaha Kecil Menengah/pembangunan revitalisasi pasar	185 pedagang	DAK FISIK
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
3	Pelatihan Audit Koperasi dan Kompetensi Pengawas Koperasi	OKU Selatan	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	40 koperasi	DAK NF
4	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	OKU Selatan	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	40 koperasi	DAK NF
5	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pinjaman dan Permodalan bagi Koperasi	OKU Selatan	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	40 koperasi	DAK NF
6	Pelatihan Penyusunan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	OKU Selatan	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	40 koperasi	DAK NF
7	Pelatihan Penyusunan Pelaporan Keuangan Koperasi	OKU Selatan	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	40 koperasi	DAK NF
8	Pelaporan Laporan Perpajakan bagi Koperasi	OKU Selatan	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	40 koperasi	DAK NF
9	Pelatihan Akuntansi Koperasi berbasis Digital	OKU Selatan	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	40 koperasi	DAK NF
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				
10	Pelatihan Wirausaha Pemula dan Berkembang	OKU Selatan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	50 UMKM	DAK NF
11	Pelatihan Penguatan Mutu Produk UMKM	OKU Selatan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	50 UMKM	DAK NF
12	Pelatihan Klinik Desain Merek Kemasan dan Pembuatan Logo Produk UMKM	OKU Selatan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	100 UMKM	DAK NF
13	Pelatihan fasilitasi akses pembiayaan bagi usaha mikro	OKU Selatan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	100 UMKM	DAK NF
14	Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	OKU Selatan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	100 UMKM	DAK NF
15	Seminar Motivasi diri UMKM Naik Kelas	OKU Selatan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	150 UMKM	DAK NF
16	Pelatihan Perlibatan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa	OKU Selatan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	100 UMKM	DAK NF
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota				
17	Pemberdayaan pemahaman SDM koperasi, peningkatan pertumbuhan koperasi hingga menjadi koperasi moderen, dan meningkatkan perekonomian dengan koperasi	Lahat	Jumlah SDM Koperasi yang memahami koperasi di kab. Lahat	100 Orang	DAK NF
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota				
18	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Lahat	Jumlah SDM koperasi yang mengerti tentang manajemen koperasi sebanyak	70 orang	DAK NF
	Pogram Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				
	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				
19	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Lahat	Bertambahnya Pengusaha UMKM yang mempunyai izin usaha	72 UMKM	DAK NF
	Program Pengembangan UMKM				
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil				
20	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Lahat	Jumlah peserta kewirausahaan sebanyak 120 orang	120 Orang	DAK NF
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN				
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten				
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
21	Bintek Pembinaan Koperasi Syariah	OKU Timur		10 Koperasi	DAK NF
22	Pelatihan Koperasi Moderen berbasis Digitalisasi	OKU Timur		30 Koperasi	DAK NF
23	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Manajer, Juru buku dan Kasir Koperasian	OKU Timur		30 Koperasi	DAK NF
24	Pelatihan Laporan Keuangan Koperasi untuk Penyusunan Laporan RAT	Desa Tegal Rejo, Belitang		60 Orang	DAK NF
25	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Desa Tegal Rejo, Belitang		30 Koperasi	DAK NF
	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian				
26	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten		Jumlah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
27	Pelatihan Kelembagaan Koperasi	Kecamatan Muara Enim	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Kelembagaan Koperasi	60 Orang	DAK NF
28	Pelatihan dan Uji Kompetensi SKKNI bagi Kasir Ritel	Kecamatan Muara Enim	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan dan Uji Kompetensi SKKNI bagi Kasir Ritel	60 Orang	DAK NF
29	Pelatihan Manajemen Koperasi khusus Bagi KSP/USP Pola Syari'ah	Kecamatan Muara Enim	jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Manajemen Koperasi khusus Bagi KSP/USP Pola Syari'ah	60 Orang	DAK NF
30	Peningkatan SDM Pengawas Koperasi	Kecamatan Muara Enim	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Peningkatan SDM Pengawas Koperasi	60 Orang	DAK NF

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN				
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten				
31	Pelatihan akuntansi keuangan koperasi	Kab. OKI	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan	30 orang	DAK NF
	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECI				
32	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Kab. OKI	Jumlah Peserta Kewirausahaan	50 Orang	DAK NF
33	Pelatihan Digital marketing UMKM dan pelatihan pengelolaan keuangan UMKM	Kab. OKI	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	30 UMKM	DAK NF
34	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kab. Empat Lawang			DAK NF
35	Pelatihan Usaha Perkoperasian	Kab. Empat Lawang	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	37 Koperasi	DAK NF
36	Pelatihan Administrasi Perkoperasian	Kab. Empat Lawang	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	37 Koperasi	DAK NF
37	Sosialisasi dan Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Koperasi	Kab. Empat Lawang	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	20 Koperasi	DAK NF
38	Fasilitasi Bimtek Pejabat Pengawas, PPKL dan operator ODS	Kab. Empat Lawang	Jumlah Pejabat yang mengikuti pelatihan	6 Orang	DAK NF
	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				
39	Pelatihan Kelebihan dan Menggali Potensi Pasar Online	Kab. Empat Lawang	Jumlah Peserta UKM Pemula yang mengikuti pelatihan	50 Orang	DAK NF
40	Pelatihan Pembukuan Sederhana Pada Pelaku UKM	Kab. Empat Lawang	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	50 Orang	DAK NF
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota				
41	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Kec. Talang Ubi, Penukal, Penukal Utara, Abab dan Tanah Abang (PALI)	Jumlah SDM koperasi yang pengetahuan perkoperasian	210 orang	DAK NF
	Pogram Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				
	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataa, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan paa pemangku kepentingan				
42	Penyelenggaraan pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	Kec. Talang Ubi, Penukal, Penukal Utara, Abab dan Tanah Abang (PALI)	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	150 UMM	DAK NF
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
	Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota				
43	Pemberdayaan pemahaman SDM koperasi, peningkatan pertumbuhan koperasi hingga menjadi koperasi moderen, dan meningkatkan perekonomian dengan koperasi	Pagaralam	Jumlah SDM Koperasi yang memahami koperasi di Kota Pagaralam	100 Orang	DAK NF
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota				
44	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Pagaralam	Persentase jumlah anggota koperasi yang dibina	33 orang	DAK NF
	Program Pengembangan UMKM				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil				
45	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Pagaralam	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	120 Orang	DAK NF
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota				
46	Pendidikan dan pelatihan penggerak koperasi	Prabumulih	Jumah penggerak koperasi yang mengikuti pelatihan	30 orang	DAK NF
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota				
47	Pelatihan Usaha Perkoperasian	Muratara	Jumlah peserta pelatihan usaha perkoperasian	30 koperasi	DAK NF
48	Pelatihan Administrasi Perkoperasian	Muratara	Jumlah peserta pelatihan administrasi perkoperasian	30 koperasi	DAK NF
49	Sosialisasi dan Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Koperasi	Muratara	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi	10 koperasi	DAK NF
50	Bintek petugas penyuluh koperasi	Muratara	jumlah petugas penyuluh yang mengikuti bimtek	3 orang	DAK NF
	Program Pengembangan UMKM				
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil				
51	Pelatihan manajemen usaha dan keuangan	Muratara		30 UMKM	DAK NF
52	Pendidikan dan latihan pemasaran	Muratara		30 UMKM	DAK NF
	Program Pengembangan UMKM				
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil				
	Fasilitasi pemasaran berbasis digital (online)				
53	Pendampingan pelaku UMKM dalam hal penjualan produk secara online (kerjasama dengan provider dan tokopedia, shopee dan bukalapak) selama 5 tahun	Banyuasin		100 UMKM	DAK NF
54	Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil				
55	Pelatihan Kemasan dan bantuan peralatan produksi	Banyuasin		100 UMK	DAK NF
56	Pelatihan pembuatan jajanan pasar	Banyuasin		100 UMK	DAK NF
57	Pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi bantuan untuk wirausaha pemula	Banyuasin		100 UMK	DAK NF
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
	Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota				
	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
58	Pendampingan cara membuka izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	Banyuasin	Terbentuknya KSP	20 Koperasi	DAK NF
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota				
59	Paltihan peningkatan SDM pengelola koperasi berbasis kompetensi	Banyuasin	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan 2 orang/koperasi	40 Orang	DAK NF
60	Pelatihan komputer akuntansi bagi koperasi	Banyuasin	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan 2 orang/koperasi	41 Orang	DAK NF
61	Sosialisasi dan Fasilitasi permodalan bagi Koperasi	Banyuasin	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan 2 orang/koperasi	42 Orang	DAK NF

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah, dilakukan pula penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, urusan pemberdayaan Koperasi dan UMKM mendukung satu prioritas nasional, yaitu Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

Pembangunan ekonomi tahun 2023 akan dilaksanakan untuk mendukung proses transformasi ekonomi setelah pada tahun sebelumnya dihadapkan pada pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Tahun 2023 merupakan momentum untuk menciptakan horizon baru pembangunan dengan menekankan pada strategi mewujudkan SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi perekonomian domestik, dan pemindahan IKN. Proses transformasi ekonomi yang dilaksanakan oleh sektor energi, sumber daya air, UMKM, pariwisata, pertanian, industri, perdagangan, keuangan, dan sektor lainnya akan menghadapi tantangan yang membutuhkan kebijakan dan strategi untuk dapat mencapai sasaran pembangunan nasional.

Untuk mendukung penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan koperasi untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi pada fokus peningkatan produktivitas antara lain (1) rendahnya nilai tambah produk UMKM, (2) kurangnya akses informasi terkait pembiayaan dan pemasaran, dan (3) terbatasnya kapasitas dan kemampuan manajerial

pelaku UMKM dan koperasi. Selain itu, tantangan pada fokus inklusif di antaranya (1) minimnya UMKM yang menjalin kemitraan strategis dengan usaha besar, (2) rendahnya partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan dan BUMN, (3) rendahnya tingkat kepemilikan izin usaha sehingga masih banyak usaha yang bergerak di sektor informal, serta (4) belum optimalnya layanan pendampingan dan konsultasi usaha.

Adapun indikator dalam sasaran Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi adalah :

1. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (21,44%)
2. Pertumbuhan wirausaha (2,74%), dan
3. Kontribusi koperasi terhadap PDB (5,4%)

Pada PP Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi, strategi yang mendukung fokus produktivitas mencakup (a) digitalisasi usaha; (b) perbaikan iklim usaha dan peningkatan kapasitas pelaku usaha; (c) pembangunan basis data tunggal UMKM; (d) optimalisasi pengelolaan terpadu UMKM berbasis potensi wilayah, termasuk fasilitasi rumah produksi bersama; (e) peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta BUMN; (f) akselerasi penerapan kemitraan usaha; (g) peningkatan kurasi dan standardisasi produk UMKM, termasuk sertifikasi halal; (h) penyediaan akses pembiayaan yang luas melalui KUR, Kredit UMi, PNM Mekaar dan ULaMM, dan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM); serta (i) subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM. Selanjutnya strategi yang mendukung fokus inklusif yakni (a) penguatan lembaga dan model layanan pendampingan usaha, 1b; penguatan literasi keuangan dan digital, (c) penyediaan informasi pasar melalui market intelligence, (d) fasilitasi kemitraan usaha, (e) percepatan transformasi usaha informal menjadi formal, serta (f) optimalisasi layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.

Dengan strategi kebijakan prioritas Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi di atas telah sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Koperasi dan UKM pada misi kedua kepala daerah yaitu:

“Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan” Dan bersinergi dalam tataran Prioritas Daerah 2 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi.

Selanjutnya mengacu pada tema pembangunan daerah maka diharapkan peran Koperasi dan UMKM dapat mendukung dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang masih berada di atas tingkat nasional.

3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis tahun 2019-2023. Berikut merupakan target tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023:

Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi & UKM Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UKM	1.1. Presentase Pertumbuhan Modal Koperasi	8,5%
			1.2. Jumlah Kenaikan Wirausaha baru	350 UKM
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM	Meningkatnya Jaringan Koperasi dan UKM	2.1. Persentase Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	1%
			2.2. Persentase meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1%
3	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UKM	3.1. Jumlah Koperasi Aktif	20 Unit
			3.2. Jumlah UMKM Naik Kelas	500 UMK

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan beberapa faktor, diantaranya: kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, dan Renstra SKPD.

Secara garis besar usulan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 8 program, 14 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 24.265.871.268,-** (Dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enampuluh delapan rupiah) yang bersumber pada APBD Provinsi Sumatera Selatan, Dana Insentif Daerah (DID Inflasi), DAK Non-fisik PK2UMK. Anggaran tersebut bertambah sebesar **Rp. 2.818.873.468,-** yang terdiri dari DAK Nonfisik dan DID Inflasi Tahun 2023.

Lokasi sasaran dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah 17 Kab/Kota se-Sumatera Selatan.

Rumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III-2
Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2	17	1			16.046.997.800			100 %	16.743.737.800			
2	17	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku		100 %	550.100.000	738.680.800		
2	17	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan/Luar Daerah	3 dok	330.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 dok	330.100.000
2	17	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA-SKPD	OPD	1 dok	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 dok	100.000.000
2	17	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	OPD	1 dok	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 dok	100.000.000
2	17	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dalam dan/Luar Daerah	6 lap	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6 lap	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Realisasi Kinerja SKPD							
2	17	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD	12 lap	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 lap	108.580.800
2	17	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku		100 %	11.165.057.000			100 %	11.315.057.000
2	17	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	14 bulan	9.844.357.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14 bulan	9.844.357.000
2	17	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya administrasi pelaksanaan tugas ASN	OPD	13 bulan	946.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 bulan	946.660.000
2	17	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	OPD	12 bulan	224.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	224.040.000
2	17	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	OPD	1 dok	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	100.000.000
2	17	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OPD	1 lap	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 lap	100.000.000
2	17	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/	OPD	4 lap	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 lap	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
		Triwulanan/ Semesteran SKPD											
2	17	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	130.000.000			100 %	100.000.000
2	17	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD	1 dok	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	-
2	17	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya diklat kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi	OPD	12 bulan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	100.000.000
2	17	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		100 %	2.153.580.800			100 %	2.560.000.000
2	17	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	12 bulan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	50.000.000
2	17	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	12 bulan	1.043.580.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	1.000.000.000
2	17	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan	OPD	12 bulan	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	350.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
		makan minum rapat											
2	17	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	OPD	12 bulan	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	40.000.000
2	17	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD	12 bulan	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	20.000.000
2	17	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Dalam dan/Luar Daerah	12 bulan	700.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	1.100.000.000
2	17	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah		100 %	90.000.000			100 %	-
2	17	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya aplikasi/software penunjang operasional perangkat daerah	OPD	2 aplikasi	90.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 aplikasi	-
2	17	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	457.600.000			100 %	630.000.000
2	17	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangko, Materai	OPD	12 bulan	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	30.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
		dan Benda Pos Lainnya										
2	17	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya tagihan telepon, air dan listrik kantor	OPD	12 bulan	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 bulan	300.000.000
2	17	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor dan tutor SKJ	OPD	12 bulan	187.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 bulan	300.000.000
2	17	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD sebagai penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	1.500.660.000		100 %	1.400.000.000
2	17	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara serta Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	OPD	17 unit	300.660.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17 unit	300.000.000
2	17	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel kantor	OPD	12 bulan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 bulan	-
2	17	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	OPD	12 bulan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 bulan	100.000.000
2	17	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	OPD	12 bulan	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 bulan	1.000.000.000
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Terfasilitasinya izin Usaha Simpan		100 %	100.000.000		100 %	150.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Pinjam untuk Koperasi							
2	17	2	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi		100 %	100.000.000			100 %	150.000.000
2	17	2	1.01	1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Dalam dan/Luar Daerah	20 unit usaha	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 unit usaha	150.000.000
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi sehat		20 koperasi	400.000.000			20 koperasi	500.000.000
2	17	3	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti peningkatan kompetensi perkoperasian		100 orang	400.000.000			100 orang	500.000.000
2	17	3	1.01	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan dan Tersedianya	Dalam dan/Luar Daerah	20 unit usaha	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 unit usaha	500.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
		Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel										
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			20 koperasi	400.000.000	20 koperasi	500.000.000	
2	17	4	1.01		<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Koperasi Binaan provinsi yang mengikuti pelatihan KSP dan USP koperasi</i>		100 %	400.000.000	100 %	500.000.000	
2	17	4	1.01	1	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Dalam dan/Luar Daerah	20 unit usaha	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20 unit usaha	500.000.000
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah UMKM naik kelas Persentase pertumbuhan modal koperasi		2500 UMK 2 persen	900.000.000		2500 UMK 2 persen	3.000.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	17	5	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikat pelatihan		350 orang	500.000.000			350 orang	2.200.000.000
2	17	5	1.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Dalam dan/Luar Daerah	350 orang	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350 orang	2.200.000.000
2	17	5	1.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM UKM yang mendapatkan sertifikat pelatihan		350 orang	400.000.000			350 orang	800.000.000
2	17	5	1.02	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Meningkatnya kapasitas serta kompetensi SDM UKM	Dalam dan/Luar Daerah	350 orang	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350 orang	800.000.000
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas		3 persen	1.500.000.000			3 persen	1.300.000.000
2	17	6	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi aktif		20 koperasi	1.500.000.000			20 koperasi	1.300.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	17	6	1.01	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dalam dan/Luar Daerah	20 unit usaha	1.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 unit usaha	1.300.000.000
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah kenaikan wirausaha baru		350 UKM	600.000.000			350 UKM	2.000.000.000
2	17	7	1.01		<i>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha</i>		<i>1 persen</i>	<i>600.000.000</i>			<i>1 persen</i>	<i>2.000.000.000</i>
2	17	7	1.01	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan	Dalam dan/Luar Daerah	700 unit usaha	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		#####	2.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan							
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			30 persen	2.500.000.000
					Prosentase kenaikan omzet UMKM				
2	17	8	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			100 persen	2.500.000.000
					Jumlah UMKM yang dibina				
2	17	8	1.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dalam dan/Luar Daerah	30 unit usaha	30 unit usaha	2.500.000.000
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				
TOTAL									26.693.737.800
									21.446.997.800

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Salah satu tahapan dalam proses perencanaan Pemerintah Daerah adalah pembuatan dokumen RKPD. Dokumen RKPD ini mempunyai nilai sangat strategis dan penting, karena dokumen ini merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD. Selain itu dokumen RKPD merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD.

Dokumen RKPD ini juga dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu di arahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian diarahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

BAB V

PENUTUP

CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN, BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAANNYA MAUPUN SEANDAINYA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RENJA Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RENJA Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan RENJA Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara RKPD, RENJA, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Komitmen tersebut selanjutnya diharapkan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan ditandatangani di awal tahun, baik di tingkat Eselon II, III, IV, dan Staf.

3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan RENJA Tahun 2023 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.

RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2023, selanjutnya RENJA Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Jend. Sudirman KM. 3,5 No. 565

Telp. (0711) 355804

Fax. (0711) 352082

PALEMBANG - 30129

